

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ketertiban sosial adalah sistem kemasyarakatan berupa hubungan dan kebiasaan untuk mencapai tujuan dan sasaran masyarakat. Ketertiban sosial sebagai kegiatan yang berlangsung lama pada masyarakat sederhana sehingga menghasilkan sosialisasi yang tertib sosial. Hal ini bertujuan agar semua orang berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Pada prinsipnya ketertiban adalah produk interaksi sosial yang berjalan harmonis dan selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Stabilitas sosial dengan demikian memiliki asosiasi yang dekat dengan ketertiban sosial. Kondisi sosial yang berpola, ajeg, dan terjadi secara rutin dapat terjadi bila ditopang oleh adanya ketertiban sosial. Ketertiban juga identik dengan stabilitas dan regularitas. Kota Batam Merupakan kawasan destinasi wisata terpadu, diantaranya wisata alam, serta wisata sejarah. Beragamnya potensi daya tarik wisata yang ada sehingga pemerintah perlu membuat konsep perencanaan dan pengembangan destinasi wisata terpadu di Kota Batam. Selain perlu membuat konsep perencanaan dan pengembangan destinasi wisata terpadu di Kota Batam, pemerintah juga perlu menyajikan kota Batam sebagai kota yang bebas dari masalah ketertiban sosial seperti gelandangan dan pengemis. Keberadaan gelandangan dan pengemis sangat meresahkan, karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat di jalan raya dan juga merusak keindahan kota Batam sebagai kota pariwisata. Keberadaan gelandangan

dan pengemis juga dapat menimbulkan kasus kriminal seperti mencopet, mencuri, menjambret dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemerintah harus segera menyelesaikan masalah gelandangan dan pengemis agar tidak memberikan dampak yang merugikan (Aminuddin, 2020).

Sejumlah warga mulai mengeluhkan maraknya gelandangan yang berkeliaran di sejumlah lampu merah di Batam. Apalagi, tak jarang mereka berbuat hal yang merugikan pengguna jalan. Anak gelandangan yang sering beroperasi meminta sedekah dari pengendara bisa dilihat di simpang lampu merah Sekupang Batam, mulai dari sore hari sampai malam hari. Di kota Batam, keberadaan Gelandangan dan pengemis masih sering ditemui, biasanya para gelandangan dan pengemis tersebut mulai meminta sedekah di persimpangan dari sore hari sampai malam hari. Para gelandangan dan pengemis tersebut bisa dijumpai di simpang Panbil, simpang Kepri Mall (Tribun Batam, 2019).

Kota Batam merupakan salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau yang semakin marak munculnya gelandangan dan pengemis. Kota Batam sebagai daerah dengan jumlah pendatang yang meningkat setiap harinya menyebabkan meningkatnya masalah sosial. Menurut data BPS Kota Batam total warga Kota Batam meningkat rata-rata 100.000 kepala. Perkembangan warga paling banyak dibantu dari imigran baru kurang lebih 65% keluaran kurang lebih 35%. Kebanyakan gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Batam merupakan pendatang dari berbagai daerah di luar Kota Batam sehingga tidak memiliki KTP Kota Batam (Kepri Update 2016).

**Tabel 1.1 Data Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam Tahun 2017-2019**

No	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Belakang Padang	-	-	-
2	Bulang	-	-	-
3	Galang	-	-	-
4	Sei. Beduk	13	17	27
5	Nongsa	17	15	23
6	Sekupang	9	19	32
7	Lubuk Baja	48	41	59
8	Batu Ampar	39	39	43
9	Batam Kota	40	45	61
10	Sagulung	11	25	32
11	Batu Aji	13	20	36
12	Bengkong	5	23	30
<b>Total</b>		<b>195</b>	<b>244</b>	<b>343</b>

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Batam meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 berjumlah 195 orang. Pada tahun 2018 meningkat jumlahnya menjadi 244 dan pada tahun 2019 semakin bertambah menjadi 343 orang. Gelandangan dan pengemis yang terdata di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam ini terdiri dari Bapak/Ibu usia lanjut dari umur 30 tahun ke atas, anak-anak dari umur 7-12 tahun ke atas, dan penyandang cacat fisik. Hal ini tentu saja menjadi

tugas Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat untuk segera menangani permasalahan gelandangan dan pengemis ini.

Dari berbagai masalah sosial yang terjadi di Kota Batam, pemerintah berupaya untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menggelar razia Gelandangan dan pengemis (gelandangan dan pengemis) di sejumlah titik lampu merah. Razia ini merupakan kegiatan rutin yang di gelar oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Koordinator penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Yena mengatakan razia kali ini fokus untuk menertibkan para orangtua yang membawa anaknya saat berjualan disekitar lampu merah. Yena menuturkan bahwa, asesmen yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat biasanya tidak menggunakan kendaraan (Kendaraan Dinas) ketika Razia. Melainkan menggunakan motor untuk memantau lokasi yang mulai ramai Gelandangan dan pengemis untuk segera diamankan (Infopublik, 2020).

Nyaris di setiap persimpangan jalan di Kota Batam, pemandangan banyaknya peminta-minta senantiasa terlihat. Ada orang tua, anak-anak, dan tidak jarang remaja juga terjun ke jalanan untuk meminta-minta. Aksi mereka pun bermacam-macam. Ada yang menghampiri pengendara, ada juga hanya duduk diam di persimpangan sambil membawa mangkuk tempat uang (Tribun Batam.id).

Karena kurangnya penelitian tentang implementasi kebijakan ketertiban sosial di Kota Batam terutama penelitian gelandangan dan pengemis, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Karena implementasi kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan publik yang merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara kebijakan untuk mencapai tujuannya. Secara umum, implementasi mempunyai arti penerapan undang-undang, di antara beragam pelaku, institusi, proses dan teknologi akan bekerjasama dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan dari rencana tersebut. Berdasarkan pandangan yang tertera, lalu peneliti membuat penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Ketertiban Sosial di Kota Batam (Studi Kasus pada Kawasan Bebas Gelandangan dan Pengemis).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah implementasi kebijakan ketertiban sosial di Kota Batam pada kawasan bebas gelandangan dan pengemis?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan ketertiban sosial di Kota Batam pada kawasan bebas gelandangan dan pengemis.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Secara akedemis
  - a) Penelitian ini dapat menjadi refrensi dengan ruang lingkup yang sama bagi penelitian selanjutnya.
  - b) Untuk memberi perkembangan ilmu administrasi publik khususnya kebijakan publik.
- 2) Secara praktis
  - a) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam  
Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam implementasi kebijakan sosial khususnya penanganan kawasan bebas gelandangan dan pengemis.